

BAB VI

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2013

A. KONDISI UMUM

Didalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2013, pembangunan transportasi udara ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu strategi pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan udara, serta strategi pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan transportasi udara, yang dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan dalam penyelenggaraan transportasi udara; meningkatkan kualitas dan produktifitas pelayanan dengan penerapan manajemen mutu untuk memenuhi kebutuhan (*demand*) jasa transportasi udara, menciptakan iklim usaha jasa transportasi dalam persaingan yang sehat dan kondusif menuju industri penerbangan yang efisien, efektif, kompetitif dan berkelanjutan, yang mendorong minat investasi pihak swasta; dan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, serta mampu mendukung penanganan bencana.

Prioritas pembangunan bandar udara, pelayanan dan pengawasan penerbangan sipil di Indonesia didasarkan pada:

1. Pemeliharaan/perawatan dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Pembangunan/pengembangan bandar udara bagi pengoperasian pesawat sejenis B 737 untuk ibukota provinsi dan pembangunan Bandar Udara yang ramah terhadap lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim global (*climate change*);
3. Perhatian khusus kepada pengembangan bandar udara pada daerah terisolasi, daerah perbatasan terutama kawasan/daerah tertinggal dan daerah rawan bencana;
4. Pemenuhan permintaan jasa transportasi udara saat ini dan yang akan datang, didasarkan baik pada analisis permintaan maupun kapasitas;
5. peningkatan kualitas SDM dalam melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap operasional bandar di Indonesia.

Prioritas pembangunan transportasi udara pada tahun 2013 yaitu:

1. Pemenuhan Pendanaan Kontrak *Multi Years* (Bandara Kualanamu Medan, pembangunan Gedung *Jakarta Automated Air Traffic System (JAATS)* dan Pengadaan Simulator Pesawat Kalibrasi Penerbangan);
2. Program kegiatan yang bersifat Lanjutan dan/ atau penyelesaian pembangunan sehingga dapat segera beroperasi;
3. Pembentukan 10 Kantor Otorita Bandara, untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap operasional Bandara di Indonesia;

4. Pengembangan Bandara di Koridor Ekonomi yang mendukung Masterplan Percepatan Pengembangan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta *Domestic Connectivity*;
5. Percepatan pembangunan dan pengoperasian 14 Bandara Baru (Sesuai Direktif Presiden dalam Nota Keuangan tahun 2010):
 - a) Bandara Muara Bungo;
 - b) Bandara Muara Teweh Baru- Kalimantan Tengah;
 - c) Bandara Morowali – Sulteng;
 - d) Bandara Tojo Una-Una – Sulteng;
 - e) Bandara Bone – Sulsel;
 - f) Bandara Saumlaki Baru;
 - g) Bandara Tual Baru- Ibra;
 - h) Bandara Kufar;
 - i) Bandara Namniwel;
 - j) Bandara Waisai;
 - k) Bandara Enggano;
 - l) Bandara Sumarorong;
 - m) Bandara Sinak Baru;
 - n) Bandara Waghete baru.
6. Pembangunan Bandara di Kawasan Perbatasan dan Rawan Bencana;
7. Rehabilitasi dan Pengembangan Prasarana Bandar Udara;
8. Penyediaan Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia;
9. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keamanan, Keselamatan dan Navigasi Penerbangan;
10. Peningkatan *Jakarta Automated Air Traffic System (JAATS)* di Bandar Udara Soekarno Hatta. Pengembangan New JAATS dengan kemampuan New CNS/ATM, antara lain Mode-S Radar, ADB-S Processing, ADS-C/CPDLC, AIDC, ATN dan RVSM. New JAATS direncanakan mempunyai kemampuan minimal seperti MAATS dan rapat mengcover ruang udara, Makasar FIR serta dapat menjadi *Back-up* sistem MAATS ;
11. *Up date New Flight Plan Format* di Indonesia (MAATS).

Upaya dan hasil-hasil yang dicapai untuk Pembangunan Prasarana Bandar Udara berdasarkan KM. 11 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Kebandarudaraan Nasional adalah 233 bandar udara yang terdiri dari 164 bandara yang dikelola UPT Ditjen Hubud, 13 bandara yang dikelola PT (Persero) Angkasa Pura I, 12 bandara yang dikelola PT (Persero) Angkasa Pura II dan 14 bandara baru.

Hingga Tahun 2012 terdapat beberapa pembangunan bandar udara yang telah dan akan dilanjutkan secara bertahap untuk melayani penerbangan umum yang merupakan bandara-bandara baru yaitu Bandara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Dumatubun Baru, Waghete Baru. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana dan perbatasan untuk mengantisipasi bencana serta melaksanakan pengamanan wilayah Indonesia (secara *security approach* maupun *prosperity approach*) dibuat program pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk didarati pesawat tipe C-130 Hercules

pada lokasi yang sudah atau belum ada bandara dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan pendanaan.

Pembangunan fasilitas bandara meliputi sisi darat dan udara yang tersebar di seluruh di Indonesia pada tahun 2011 meliputi pembangunan Terminal seluas 7.830 m² di 13 lokasi bandara, rehabilitasi terminal seluas 2.074 m² di 11 lokasi bandara, pembangunan gedung operasional seluas 7.340 m² di 73 lokasi, rehabilitasi gedung seluas 7.840 m² di 440 lokasi serta pembangunan sisi udara meliputi pembangunan/konstruksi/perpanjangan/pelapisan landasan, apron, *taxiway*, *turning area*, *stop way*, *over run* dan RESA seluas 1.348.294 m² di 89 lokasi bandara. Dalam rencana proyek kontrak strategis Ditjen Perhubungan Udara posisi Juni 2012 telah dilaksanakan kontrak sebanyak 390 paket kegiatan strategis dimana termasuk didalamnya pembangunan terminal, pembangunan bangunan operasional, rehabilitasi gedung operasional, serta pembangunan sisi udara meliputi pembangunan/konstruksi /perpanjangan/pelapisan landasan, apron, *taxiway*, *turning area*, *stop way*, *over run* dan RESA termasuk didalamnya.

Untuk menunjang aktivitas penerbangan malam dan meningkatkan minimal operasional (*visibility*), maka bandara telah dilengkapi dengan lampu landasan (*Runway Light*), yang diantaranya dilengkapi dengan lampu pendaratan PALS (*Precision Approach Lighting System*) dan dilengkapi dengan MALS (*Medium Approach Lighting System*). Pemasangan ILS (*Instrument Landing System*) yang digunakan sebagai alat bantu pendaratan instrument (*non visual*) oleh penerbang dalam melakukan prosedur pendekatan dan pendaratan. Tahun 2011 telah terpasang ILS sebanyak 44 unit di bandara dan 3 unit di Balai Elektronika Penerbangan berupa mock up peralatan. Hingga Tahun 2012 telah terpasang ILS sebanyak 46 unit di 37 lokasi Bandara dan 3 unit di Balai Elektronika Penerbangan berupa *mock up* peralatan.

Dalam rangka pemantauan dan pengamatan penerbangan, secara bertahap dialokasikan pemasangan RADAR. Tahun 2011 telah terpasang peralatan RADAR sebanyak 46 Unit di 32 lokasi yang beroperasi, dan terdiri dari PSR (*Primary Surveillance Radar*) sebanyak 15 Unit, SSR (*Secondary Surveillance Radar*) sebanyak 17 Unit, dan MSSR (*Monopulse Secondary Surveillance Radar*) sebanyak 14 unit. Hingga Tahun 2012 telah terpasang peralatan RADAR sebanyak 49 Unit di 35 Lokasi yang terdiri dari PSR sebanyak 15 Unit, SSR sebanyak 17 Unit, dan MSSR sebanyak 17 Unit.

Jumlah peralatan NDB sebagai peralatan navigasi pada Tahun 2011 telah terpasang sebanyak 181 unit yang terdiri dari 125 unit untuk *Low Range*, 42 unit *Medium Range*, dan 14 unit *High Range*, terdapat beberapa peralatan yang tidak dapat berfungsi/terdapat gangguan ataupun rusak sehingga jumlah peralatan NDB pada Tahun 2012 telah terpasang sebanyak 184 unit yang terdiri dari 132 unit untuk *Low Range*, 39 unit *Medium Range*, dan 13 unit *High Range*. NDB dipergunakan sebagai peralatan untuk *Holding*, *Homming*, dan sebagai *locator system* untuk pendaratan presisi (*ILS*), serta untuk menunjang *approach* dan *enroute* sebagai penunjang dari peralatan DVOR dan DME. Penambahan NDB akan tetap dipergunakan terutama

untuk wilayah-wilayah yang memiliki geografis yang sulit terutama pada wilayah timur Indonesia dan pada Bandara dengan jumlah *traffic*/lalu lintas yang tinggi.

Pemasangan DVOR/DME hingga tahun 2011 jumlah peralatan DVOR yang terpasang meningkat menjadi 79 unit dan DME sebanyak 81 unit. Hingga Tahun 2012 jumlah peralatan DVOR dan DME yang terpasang sebanyak 81 unit DVOR dan 83 unit DME. Dengan dipasangnya alat tersebut, maka proses pendekatan dan pendaratan pesawat udara yang sebelumnya dilakukan dengan prosedur visual (*visual approach*) akan meningkat menjadi prosedur instrumen non presisi, sehingga dapat meningkatkan aspek keselamatan penerbangan.

Untuk peralatan komunikasi penerbangan sampai Tahun 2012 pemasangan peralatan VHF-ER telah terpasang sebanyak 37 unit dan VHF A-G ADC di 52 lokasi. Dengan penambahan peralatan tersebut sebagian bandara telah mengalami peningkatan pelayanan lalu lintas penerbangan yang semula bersifat informatif menjadi aktif (*positif controlled*), Hingga tahun 2010 jumlah pelayanan lalu lintas udara ADC sebanyak 51 lokasi, sedangkan untuk pelayanan APP (*Approach Controled*) sebanyak 31 lokasi.

Pada tahun 2011 peningkatan kehandalan peralatan komunikasi penerbangan adalah Rekondisi AMSC (*Aeronautical Message Switching Centre*) di MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*); Upgrade VCSS di MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*); Pemasangan ATN (*Aeronautical Telecommunication Network*) Router tahap IV.

Peningkatan Peralatan Informasi Aeronautika Pengadaan *Back Up* Sistem untuk pelayanan NOTAM *office* yang ditempatkan di MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*); *Up Grade system Atalis* untuk pelayanan NOTAM (*Notice To Airmen*) di Biak, Ambon, Manado dan Banjarmasin. Peningkatan Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari ADC ke APP untuk Bandara Iskandar Pangkalan Bun, dan Bandara Domine Eduard Osok Sorong; Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari AFIS ke *Aerodrome Control* untuk Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2011; Rencana Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari *Aerodrome Control* ke APP untuk Radin Inten II Lampung; Rencana Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari AFIS ke *Aerodrome Control* untuk Bandara Blimbing Sari; Kesepakatan bersama antara Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan BMKG dengan Ditjen Perhubungan Udara No. 2365/05/BGL/2010, No. HK.303/C.17/Dep.I/BMKG.2010, No. AU/8222/KUM.399/XI/2010 tentang Pelayanan Informasi Awan Abu Vulkanik (*volcanic ash cloud*) untuk kegiatan penerbangan; Pembahasan *letter of coordination agreement* antara *Jakarta communication center* dengan *Makassar Communication Center*.

Sebagai penunjang operasional dan keamanan maka tiap-tiap bandara dilengkapi dengan peralatan *security*. Peralatan *Security X-Ray* dan kelengkapannya di bandara terdiri atas peralatan *X-Ray Bagage*, *X-Ray Cargo* dan *X-Ray Cabin*. Hingga tahun 2012 peralatan X-ray di Bandara di Indonesia berjumlah 421 unit yang tersebar 165 unit di Bandara UPT, 252 unit di Bandara Angkasa Pura I dan II serta 4 unit di Bandara Khusus dan

TNI-AU. Penambahan termasuk penggantian peralatan tersebut dapat bermanfaat meningkatkan kecepatan dalam pemeriksaan/pendeteksiian barang bawaan yang berbahaya terhadap penerbangan dan calon penumpang pesawat.

Hingga Tahun 2012, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah terpasangan 802 unit peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan yang terdiri dari peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan, antara lain *Walkthrough Metal Detector, Hand Held Metal Detector, Body Inspection Machine, Liquid Detector* dan *Ekspllosive Detector*.

Sebagai penunjang kegiatan operasional terutama bagi bandara – bandara yang memiliki kebutuhan daya listrik yang besar pemasangan genset menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang operasional peralatan-peralatan penunjang keselamatan penerbangan. Pemasangan peralatan genset disesuaikan dengan kebutuhan daya dan kapasitas bandara.

Dalam mengantisipasi perkembangan arus lalu lintas udara dan teknologi CNS/ATM serta mengatasi keterbatasan yang ada saat ini dan menampung pertumbuhan transportasi udara dimasa datang, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : Implementasi penggunaan GNSS sebagai alat bantu navigasi penerbangan; Restrukturisasi ATS rute; Implementasi RNP (*Required Navigation Performance*)/RNAV(*Radio Area Navigation*) pada ATS routes tertentu; Implementasi RVSM (*Reduced Vertical Separation Minima*) (mulai FL290 hingga FL410); Persiapan penerapan otomasi peralatan ATS di Makassar (MAATS) untuk CPDLC dan ADS-C serta ADS-B; Penerapan prosedur-prosedur operasional berbasis satelit (GNSS) dan CPDLC. Implementasi *New English Proficiency*; Persiapan modernisasi sistem otomasi di ATC Jakarta (*Jakarta Automation Air Traffic System*) untuk sistem otomasi di wilayah Barat, direncanakan untuk dilakukan modernisasi mulai tahun 2009; Instalasi sistem peralatan ADS-C dan ADS-B dilokasi yang belum terjangkau RADAR serta sebagai pengganti dan back up untuk sistem RADAR yang usia rata-ratanya sudah tua, oleh karena itu dilaksanakan penggantian dan pengadaan peralatan RADAR. Terkait dengan pengelolaan navigasi udara, hingga saat ini masih dilakukan kajian oleh team untuk memformulasikan bentuk kelembagaan dan pengelolaan ANSP (*Air Navigation Single Provider*) yang tertuang didalam UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Saat ini telah dibahas bersama dalam antar Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Bidang Perekonomian, dengan bentuk lembaga sudah defenitif berupa Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dan akan ditetapkan dalam PP. Draft RPP dalam tahap penyempurnaan oleh Kementerian Bidang Perekonomian yang akan segera disampaikan kepada Sekretariat Negara guna mendapat persetujuan Presiden. Adapun kegiatan tahun 2011 dan 2012 dalam mengantisipasi perkembangan arus lalu lintas udara terutama di wilayah FIR Jakarta, maka dilakukan pembangunan gedung JAATS serta *up date system* nya untuk mendukung *Air Traffic Flow Management System* dan Navigasi saat ini. Selain hal itu dalam rangka pengambil alihan sektor A, B dan C telah dibuat *Roadmap* hingga Tahun 2024 sebagai Rencana aksi Ditjen Perhubungan udara dengan kegiatan antara lain : mengkaji kembali *Letter*

of Agreement (LOA) di wilayah Natuna dan tidak memperpanjang *Military Training Area (MTA)*, penempatan ACC control di Singapura, pengembangan sektor Udara di Natuna menjadi *APP Control Services*, serta akan dilakukan kerjasama *Automatic Deffendence Surveillance - Broadcast (ADS-B) colaboration* .

Pada pelayanan Navigasi Penerbangan, dengan peningkatan jumlah peralatan Navigasi Penerbangan di seluruh bandara di Indonesia untuk menjaga performa dari masing-masing peralatan tersebut maka dilakukan sistem perawatan berkala salah satunya yaitu dengan melakukan kalibrasi dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Dengan kondisi kalibrasi saat ini masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana kalibrasi penerbangan berupa pesawat kalibrasi, sesuai dalam Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara.

Adapun capaian transportasi udara di bidang Navigasi Penerbangan pada Tahun 2011 adalah:

1. Peningkatan kehandalan peralatan komunikasi penerbangan, antara lain:

- Rekondisi AMSC (*Aeronautical Message Switching Centre*) di MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*);
- Upgrade VCSS di MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*);
- Pemasangan ATN (*Aeronautical Telecommunication Network*) Router tahap IV.

2. Peningkatan Peralatan Informasi Aeronautika

- Pengadaan *Back Up* Sistem untuk pelayanan NOTAM *office* yang ditempatkan di MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*);
- *Up Grade system* Atalis untuk pelayanan NOTAM (*Notice To Airmen*) di Biak, Ambon, Manado dan Banjarmasin.

3. Peningkatan Pelayanan Navigasi Penerbangan

- Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari ADC ke APP untuk Bandara Iskandar Pangkalan Bun, dan Bandara Domine Eduard Osok Sorong;
- Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari AFIS ke *Aerodrome Control* untuk Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2011;
- Rencana Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari *Aerodrome Control* ke APP untuk Radin Inten II Lampung;
- Rencana Peningkatan pelayanan Lalu lintas Udara dari AFIS ke *Aerodrome Control* untuk Bandara Blimbing Sari;
- Kesepakatan bersama antara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan BMKG dengan Ditjen Perhubungan Udara No. 2365/05/BGL/2010, No. HK.303/C.17/Dep.I/BMKG.2010, No. AU/8222/KUM.399/XI/2010 tentang Pelayanan Informasi Awan Abu Vulkanik (*volcanic ash cloud*) untuk kegiatan penerbangan;

- Pembahasan *Letter of Coordination Agreement* antara Jakarta *Communication Center* dengan Makasar *Communication Center*.

4. Peningkatan Status Pelayanan ATS

- Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan peningkatan status pelayanan ATS di 3 bandara yaitu Iskandar – Pangkalan Bun, Frans Seda – Maumere;
- D.E. Osok – Sorong, dan 2 bandara yang masih dalam progres yaitu Blimbing sari – Banyuwangi, dan Radin Inten II – Lampung.

dan hingga Tahun 2012 rencana capaian Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagai kelanjutan kegiatan Tahun 2011, antara lain :

- Peningkatan status pelayanan Navigasi Penerbangan dari AFIS ke *Aerodrome Control* di Bandara Syukuran Aminuddin – Luwuk;
- Peningkatan status pelayanan Navigasi Penerbangan dari *Aerodrome Control* ke APP di Bandara Merauke;
- Peningkatan status pelayanan Navigasi Penerbangan dari *Aerodrome Control* ke APP di Bandara Radin Inten II – Lampung;
- Peningkatan status pelayanan Navigasi Penerbangan dari AFIS ke *Aerodrome Control* di Bandara Blimbing Sari - Banyuwangi.
- Peningkatan status pelayanan Navigasi Penerbangan dari AFIS ke *Aerodrome Control* di Bandara Trunojoyo - Sumenep.
- peningkatan status pelayanan Navigasi Penerbangan dari AFIS ke *Aerodrome Control* di BandaraTunggul Wulung - Cilacap.

Hingga tahun2011 jumlah pesawat yang teregistrasi sebanyak 1209 unit dengan rincian : pesawat beroperasi 850 unit, terdiri dari *Fix Wings* 732unit dan *Rotary wings*118unit. Pesawat terdaftar AOC 135 (seat < 30) sebanyak 225 unit, AOC 121 (seat > 30) sebanyak 426 unit dan AOC 91 (*general aviation*) sebanyak 171 unit, dengan pesawat yang telah didaftar tanda pendaftaran sebanyak 165 unit dan pesawat yang telah dihapus tanda pendaftaran 83 unit. Hingga Tahun 2012 jumlah pesawat yang terigistrasi sebanyak 1276 unit dengan rincian dengan rincian : pesawat beroperasi 935 unit, terdiri dari *FixWings* 814 unit dan *Rotary wings* 133 unit. Pesawat terdaftar AOC 135 (seat < 30) sebanyak 275 unit, AOC 121 (seat > 30) sebanyak 467 unit dan AOC 91 (*general aviation*) sebanyak 171 unit, dengan pesawat yang telah didaftar tanda pendaftaran sebanyak 84 unit dan pesawat yang telah dihapus tanda pendaftaran 27 unit.

Sampai dengan Bulan Desember 2011 jumlah perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi adalah sebanyak 18 perusahaan termasuk cargo, untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang beroperasi sebanyak 41 perusahaan.

Perkembangan Subsidi Operasi Angkutan Udara Perintis selama kurun waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 jumlah rute perintis terealisasi sebanyak 130 rute dari jumlah target rute 132 rute yang ditargetkan. Di Tahun 2012 angkutan udara perintis melayani

sebanyak 132 rute dengan rincian wilayah Sumatera 22 rute, Kalimantan 19 rute, Nusa Tenggara 5 rute, Sulawesi 23 rute, Kepulauan Maluku 15 rute, Papua Barat 9 rute dan Papua 39 rute.

Terkait dengan peraturan dan regulasi penerbangan nasional, sebagai tindak lanjut penerbitan UU No.1 Tahun 2009 saat ini jumlah peraturan perundang undangan yang dihasilkan sebanyak 43 unit naskah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 30 naskah.

Terkait dengan aspek Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, didalam mencapai suatu tingkat keselamatan penerbangan yang diinginkan diperlukan metode dan tindakan-tindakan tertentu salah satunya adalah *Safety Management System* (SMS), yaitu suatu pendekatan terorganisir untuk mengelola keselamatan, yang mencakup struktur organisasi yang diperlukan, tanggung jawab, kebijakan dan prosedur. Sampai dengan tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari SMS, yaitu kegiatan sertifikasi operasi bandar udara, sertifikasi peralatan keamanan, dan sertifikasi pesawat udara.

Pada tahun 2011 disusun kegiatan *System Safety Audit* yang dilakukan kepada operator penerbangan setiap bulannya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari program *Safety Management System* dengan cara mengidentifikasi beberapa gejala yang menyebabkan kecelakaan; menindak lanjuti perbaikan yang harus dilaksanakan untuk meyakinkan standar tingkat keselamatan selalu terjaga; memonitor secara berkesinambungan dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap tingkat keselamatan penerbangan; kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Sertifikasi Operasi Bandar Udara Pada 57 bandara, Sertifikasi peralatan keamanan pada 2 bandara, Sertifikasi pesawat udara pada 536 pesawat udara, Sertifikasi Fasilitas Peralatan RDPSS Medan, Sertifikasi Fasilitas MAATS, Pembuatan Peraturan (PP, KM) terkait dengan pelaksanaan *Safety Management System* (SMS), Pembuatan organisasi formal yang terkait dengan pelaksanaan SMS.

Pelarangan terbang maskapai Penerbangan Nasional pada wilayah Eropa sampai dengan tahun 2009 telah dicabut pada bulan Juli 2009 seiring dengan kebijakan-kebijakan dari Ditjen Perhubungan Udara dalam menindaklanjuti hasil audit ICAO, diantaranya melakukan restrukturisasi organisasi kantor pusat Ditjen Perhubungan Udara dengan dikeluarkannya KM 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan struktur baru yaitu (1) Direktorat Angkutan Udara (2) Direktorat Bandar Udara (3) Direktorat Keamanan Penerbangan (4) Direktorat Navigasi Penerbangan (5) Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Peningkatan *safety oversight*, Peningkatan inspektur Ditjen Hubud, Pengaktifan PPNS, Pelaksanaan tindak lanjut hasil ICAO USOAP audit, peningkatan anggaran operasional, melaksanakan *training* SMS, mengeluarkan *safety circular*, dan merevisi beberapa peraturan penerbangan yang ada mengacu kepada ketentuan dari ICAO.

Kualitas Pelayanan Navigasi Penerbangan pada *Flight Information Region* Indonesia melalui *Breakdown of Separation (BOS)* adalah situasi dimana pesawat udara berada pada posisi diluar area separasi baik lateral maupun vertikal yang sudah ditetapkan. *Breakdown of Coordination (BOC)* adalah situasi dimana terjadi penurunan pelayanan akibat menurunnya kualitas koordinasi antar unit pelayanan, atau unit pelayanan dengan pesawat udara. Data BOS dan BOC terdiri dari lokasi dan tanggal kejadian, ATS unit dan pesawat terbang terkait serta informasi faktual dilapangan. Sesuai dengan data yang telah dilaporkan sejak 2001 hingga 2008, kecenderungan BOC adalah naik seiring dengan kenaikan jumlah pergerakan pesawat (data *aircraft departure*) namun dengan gradien yang rendah, sedangkan untuk BOS cenderung tetap. Untuk mengurangi kejadian BOS dan BOC dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan, Ditjen Hubud telah menyiapkan berbagai hal, yaitu: pembuatan *Letter of Operation Agreement* antar Bandara yang saling terkait serta antar ACC negara tetangga. Dengan *Letter of Operation Agreement* yang telah terbentuk adalah: (1) LOA antara Bandara Sultan Syarif Kasim II- Pekanbaru dengan bandara AFIS yang terletak di Propinsi Riau (Dumai info, Pelelawan info, Pasi Info, Rumbai) (2) LOA antara ACC Makassar, APP Juwata Tarakan dan TWR Bandara Kalimantan. (3) Pemenuhan kemampuan *Controller/* pemandu lalu lintas udara untuk berbahasa Inggris penerbangan. Pelaksanaan Diklat Diploma IV (RADAR) *Refreshing Course* serta Diklat *ATC Check Controller* bagi ATC, Penerbitan Approval *ATS Training School*.

Dibidang navigasi penerbangan, Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang mengatur tentang sertifikasi fasilitas navigasi (CASR part 171), pelayanan navigasi (CASR part 172), prosedur penerbangan (CASR part 173) dan informasi aeronautika (CASR part 175). Dibidang pelayanan bandar udara juga sudah disiapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil tentang bandar udara (CASR part 139). Pada Tahun 2011 dibuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 (CASR 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

Pada tahun 2006 Ditjen Perhubungan Udara telah menerapkan *National Single Window (NSW)* sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Upaya yang telah dilakukan adalah perbaikan prosedur penyampaian *notice of arrival*, evaluasi penetapan tarif berupa pengenaan tarif perhari dan penataan gudang serta Pembangunan terminal kargo, penataan prosedur dan *lay out* terminal serta sosialisasi proses pelayanan kargo selama 24 jam. Dalam rangka mempercepat pembentukan ASEAN *Economic Community* sebagaimana tertuang dalam Declaration Of Asean Concord II (Bali Concord II), negara-negara anggota ASEAN melalui *Agreement to Establish and implement The Asean Single Window (ASW)*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan sistem *National Single Window* Bandar Udara Soekarno Hatta telah melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka *Implementasi Single Window* di Bandar Udara dan spesifikasi sarana pendukung *prototype* aplikasi NSW. Peluncuran kegiatan dimaksud dilakukan pertengahan Desember 2008 melibatkan beberapa *airline*, dan kargo *handling* sebagai peserta uji coba. Dan untuk mendukung dilakukan

sosialisasi kepada penyelenggara Bandar Udara, *Airline*, komunitas kargo, *ground handling*, *warehouse operator*.

Dalam rangka menindaklanjuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Program Nasional *Single Window* guna mendukung optimalisasi dan pengembangan sistem NSW *Airportnet* sebagai berikut :

- 1) Saat ini sudah mulai diterapkan *Indonesia Trade Repository* sebagai fitur pendukung *National Single Window*;
- 2) Akan segera dilakukan pentahapan perluasan cakupan penerapan sistem NSW di 4 (empat) lokasi baru yaitu :
 - (a) Bandar Udara Juanda-Surabaya;
 - (b) Bandar Udara Halim Perdanakusuma-Jakarta;
 - (c) Bandar Udara Husein Sastranegara-Bandung;
 - (d) Bandar Udara Polonia-Medan.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan telah di keluarkan keputusan tentang Pembatasan Umur Pesawat melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 tahun 2006 tentang pembatasan pesawat udara kategori transport untuk penumpang, dimana pesawat udara yang boleh didaftarkan untuk pertama kali di Indonesia adalah yang berusia kurang dari 20 (duapuluh) tahun atau kurang dari 50000 *cycle*. Dan sebagai upaya pengawasan dan peningkatan keselamatan penerbangan dan pemenuhan regulasi serta kelancaran angkutan udara telah dilakukan *ramp-check* yang berkala dan pada periode 31 Desember 2008 pada 14 (empat belas) lokasi dan 2 (dua) lokasi Adbandara (Soekarno Hatta dan Bali) dengan hasil pesawat yang dilakukan inspeksi 331 unit dari 22 operator. Dalam kegiatan *ramp-check* dilakukan rutin pada waktu khusus seperti Lebaran, Natal, dan tahun baru.

Dalam Kerjasama Luar Negeri Angkutan Udara Internasional untuk menghadapi perkembangan dan perubahan di dunia penerbangan, Indonesia telah menyiapkan kebijakan-kebijakan angkutan udara guna meningkatkan daya saing dunia penerbangan di Indonesia. Liberalisasi angkutan udara di Indonesia dilakukan secara bertahap mengingat kendala-kendala sebagai berikut : Kinerja perusahaan nasional belum optimal untuk mengembangkan cakupan usaha dan meningkatkan daya saingnya; potensi *demand* sebagian besar kota-kota di Indonesia yang mempunyai bandar udara internasional masih rendah, sehingga penerapan *open sky* secara langsung hanya terfokus pada kota-kota yang *market demand*-nya tinggi, seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan dan Padang; pandangan masyarakat dunia terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia dan perangkat hukum yang belum terintegrasi dengan baik (bersifat sektoral).

Dengan liberalisasi yang dilakukan secara bertahap, Indonesia diharapkan memperoleh manfaat dari : Pertumbuhan perdagangan dan pariwisata; Pengembangan industri penerbangan; Pertumbuhan ekonomi daerah karena ada hubungan udara langsung dengan negara lain termasuk sektor pariwisata; Menciptakan dan Menguatkan hubungan serta kerjasama antar *airlines* internasional bagi perusahaan penerbangan; Meningkatkan daya

saing airlines nasional terhadap airlines asing; Kerjasama antara airlines nasional dan asing serta menghindari terjadinya “back-track traffic”.

Dalam tahun 2008 terdapat beberapa yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara terutama dalam peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia, diantaranya : pertemuan *Conference Roadmap to Safety* dalam rangka percepatan pencabutan larangan terbang oleh EU dan pertemuan ini diselenggarakan oleh *European Commission* yang diikuti oleh seluruh tenaga Inspektor Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kegiatan pelatihan *Risk Assesment* selama 3 hari yang dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific-Jakarta pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2008. Penyerahan *Corrective Action Plan* dari hasil temuan ICAO USOAP pada bulan Mei 2008 selama 12 hari di Ngurah-Rai Denpasar. Pertemuan *2nd Steering Committe Meeting Cooperative Arangement for Preventing the Spread of Communicable Diseases Through Air Travel (CAPSCA)* yang dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari 30 delegasi dari 11 negara anggota/administrasi ICAO. Pertemuan sidang thee *3rd D-8 Working Group on Civil Aviation and Director General Meeting* tanggal 17 s.d 18 Juni 2008 di Bali. Pelaksanaan *Training Carrier Liaison Training (Identification of Travel Document)* kerjasama Ditjen Hubud dengan *Embassy of the United States*. Penyelenggaraan Seminar *A Single National Air Navigation Service Provider (ANSP)* yang dihadiri Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan, Presiden ICAO Roberto Kobeh Gonzales dan beberapa Pembicara dari Perwakilan ASA Australia, JICA, IATA, CANSO, dan INACA. Maksud dari kegiatan ini adalah dalam memberikan masukan bagi peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia

Terdapat beberapa tingkatan yang dilakukan dalam liberalisasi angkutan udara, yaitu Forum WTO adalah forum mondial (dunia/global) yang beranggotakan semua negara di dunia dan hingga saat ini masalah liberalisasi angkutan udara yang dibahas hanya mengenai “jasa penunjang (*soft rights*)”, yang tertuang dalam *GATS Annex on Air Transport*, yaitu *Aircraft repairs and maintenance, Selling and marketing of air transport dan Computer reservation system (CRS)*. Permasalahan di dalam forum WTO yang terkait masalah *Air transport* adalah masih adanya perbedaan masalah kewenangan antara WTO dengan ICAO dalam liberalisasi bidang *hard rights*.

Posisi Indonesia hingga tahun 2008 belum membuat komitmen, karena prioritas liberalisasi angkutan udara masih di tingkat regional (ASEAN), sedangkan liberalisasi angkutan udara di tingkat APEC membahas bidang-bidang angkutan udara yang tertuang dalam 8 opsi yang terkait dengan *Airlines Ownership and Control*, Secara umum Indonesia menggunakan prinsip substansial *ownership and Effective Control dan Multiple Airlines Designations(no restriction)*.

Indonesia telah menerapkan dalam setiap perjanjian antara lain tarif (*double disapproval*). Indonesia telah mengarah pada *double disapproval* dengan beberapa ketentuan pengaman. Dalam *Air Freight (more relaxation arrangement than passengers)*, Indonesia telah merelaksasi pengaturan hak angkut untuk *air freight, Airline's Cooperative Arrangement (eq. Third Country Code Sharing)*, dimana Indonesia membuka kerjasama komersial dalam

bentuk *third party code sharing* dengan persyaratan *5th freedom rights* bagi *airlines* pihak ketiga, *Charter Services*(*Competitor schedule Airlines*). Secara umum *charter* merupakan *supplement* bagi *schedule services*, yakni *Market Access (Open all international Airport)*. Semua bandara internasional Indonesia terbuka untuk asing, *Doing Business (free transfer of earning, free to open repre-sentative, free to sell and advertise airlines product, etc)* dan Indonesia cukup terbuka dalam hal *doing business matters*.

Dalam kerjasama Indonesia dalam ASEAN ATWG, beberapa Sidang ASEAN Air Transport Working Group yang diikuti di antaranya Sidang ke-23 di Singapura tanggal 21-25 Maret 2011 dengan hasil Sidang sebagai berikut:

- (i) Telah dilakukan pembahasan konsep *Implementation Framework ASEAN Single Aviation Market (ASAM)* serta 4 (empat) buah *Roadmap*:
 - *Roadmap* bidang Ekonomi
 - *Roadmap Aviation Safety*
 - *Roadmap Aviation Security*
 - *Roadmap Air Traffic Management*
- (ii) Telah dihasilkannya draft final *7th Package of Commitments on Air Transport Services under AFAS*;
- (iii) *Parameters for the Liberalization of Air Transport Ancillary Services* hanya akan menjadi *guidelines* dan tidak akan dimasukkan pada mekanisme penghitungan *scorecard*;
- (iv) Pada pembahasan liberalisasi jasa penunjang penerbangan, Indonesia telah menyampaikan komitmen (*offer*) untuk dimasukkan pada *7th Package of Commitments on Air Transport Services under AFAS* yaitu *Air Freight Forwarding*. Selain itu pada ATWG-22, Indonesia telah menyampaikan *improved offer* untuk 3 sub-sektor, yaitu: (1) *aircraft repair and maintenance services*; (2) *selling and marketing of air transport services*; dan (3) *computer reservation system (CRS) services*;
- (v) Sidang ke-31 ASEAN STOM, Siem Reap, Kamboja, 24- 26 Mei 2011;
- (vi) Sidang ke-5 ASEAN-China Working Group on Regional Air Services Arrangement (ACRASA) di Ningbo, Zhejiang, Republik Rakyat China, tanggal 5-9 September 2011, menghasilkan draft Protokol 2 yang masih akan dilakukan pembahasan internal proposalnya, dikarenakan masih adanya kesenjangan antara Proposal ASEAN dan proposal China;
- (vii) Sidang ASEAN STOM ke-32/ATM-17, Phnom Penh, Kamboja, tanggal 12 - 16 Desember 2011. Hasil - hasil Sidang sebagai berikut :
 - Penandatanganan *7th Package of Commitments on Air Transport Services under AFAS*. Perlu disiapkan posisi mengenai kemungkinan menyampaikan komitmen baru dan kesiapan *stakeholder* penerbangan nasional dan dasar hukum untuk pembatasan *Market Access* dan *National Treatment* dari bidang-bidang yang telah dikomitmenkan;
 - Pengesahan *Implementation Framework ASEAN Single Aviation Market (ASAM)* serta 4 buah *Roadmap* perlu kesiapan sedini mungkin dari para *stakeholder* penerbangan nasional untuk program ASEAN periode 2012 - 2015 dan *beyond*;
 - Penyusunan *Roadmap Nasional* menuju ASEAN.

Liberalisasi di tingkat ASEAN membahas 2 (dua) bidang, yaitu Bidang *Soft Right* (jasa penunjang penerbangan) yang diatur dalam ASEAN *Framework Agreement on Services (AFAS)* yang meliputi *Computer Reservation System (CRS)*, *Aircraft Maintenance and Repairs*, *Sales and Marketing*, *Aircraft Leasing Without Crew*. Posisi Indonesia telah membuka keempat bidang tersebut sampai dengan mode 3, yaitu dengan kepemilikan asing maksimal 49% (kecuali *Aircraft Leasing Without Crew* yang hanya dibuka untuk mode 1 dan 2) dan dalam Bidang *Hard Right* (jasa penerbangan) yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : angkutan kargo dan angkutan penumpang. Untuk *Hard Right* liberalisasi dilakukan dengan mengacu pada ASEAN *Roadmap Integration on Air Travel Services*. Mengingat *Roadmap* adalah kesepakatan ASEAN yang bersifat mengikat para anggotanya, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN harus tunduk pada *Roadmap* dimaksud.

BIMP-EAGA Working Group on Air Linkages pada daerah-daerah yang dikembangkan adalah Bandar Seri Begawan - Brunei, Pontianak, Tarakan, Manado, Balikpapan - Indonesia, Miri, Labuhan, Kota Kinabalu, Kuching - Malaysia dan Davao, General Santos, Zamboanga, P. Princessa, Mindanao - Philippina. Konsep *3rd & 4th* yaitu kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat tidak dibatasi, *5th freedom* yaitu dilakukan dengan ketentuan penambahan per tahun 2 (dua) point sejak tahun 2006 *Multi designnated airlines*.

Dalam kerjasama dalam BIMP-EAGA, beberapa Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : BIMP-EAGA *Strategic Planning Meeting*, Kota Kinabalu tanggal 12-14 Januari 2011; Sidang ke-8 *BIMP-EAGA Transport, Infrastructure and ICT Development (TIICTD) Cluster Meeting*, Puerto Princessa, 21-23 Juni 2011; *special BIMP-EAGA Air Linkages WG Meeting*, Kota Kinabalu, 20 - 21 September 2011.

Kerjasama Angkutan Udara di sub kawasan IMT-GT, antara lain : Sidang ke-4 *IMT-GT Working Group*, di Bangkok Thailand tanggal 9-10 Mei 2011, dengan materi yaitu menyampaikan status pelaksanaan penerbangan dan insentif Bandar Udara IMT-GT di Indonesia; upaya pemberian insentif berupa diskon *landing fee* serta *parking fee*, di Bandar Udara Balikpapan, Manado, dan Pontianak; finalisasi *amendment BIMP-EAGA MOU on the expansion of air linkages Point Makassar, Sandakan dan Cagayan de Oro* sebagai Point baru BIMP-EAGA, disepakati untuk menunjuk satu kota diluar BIMP-EAGA, dalam hal ini menunjuk Solo sebagai *point beyond*;

Masing-masing Negara mendorong perusahaan penerbangan untuk melayani rute-rute yang ditunjuk :

- Kalstar akan menerbangi Pontianak - Kuching;
- Wing Air akan beroperasi di wilayah kerjasama BIMP-EAGA yang diawali dengan melakukan Riset Pasar;
- Saling tukar menukar data *traffic* setiap 3 bulan di bandar udara BIMP-EAGA;
- Philipina akan mengajukan proposal "*The Multi Airline Hub Concept for BIMP-EAGA accredited airlines*";
- Akan dilakukan proyek kerjasama dengan China yaitu *Airport/air Transport Management Capacity Building*, proposal proyek akan diajukan oleh Philipina.

Pada tahun 2005 Indonesia telah melakukan perjanjian hubungan udara dengan 68 negara. Pada tahun 2006 Indonesia telah melakukan 9 kali perjanjian hubungan udara bilateral. Perjanjian bilateral tersebut terdiri dari 3 perjanjian dengan negara baru (Islandia, Yunani dan Kenya) dan 6 perjanjian untuk merevisi MOU (UAE 2 kali pertemuan, Kamboja 2 kali pertemuan, Saudi Arabia dan Oman). Dengan tambahan 3 negara baru, sampai saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian hubungan udara dengan 71 negara yang terdiri dari 2 negara di belahan Amerika Utara, 26 negara Eropa, 13 negara ASIA, 10 negara ASEAN, 5 negara Afrika, 11 negara Timur Tengah/Arab dan 4 negara Pasific. Dari 71 negara yang telah membuat perjanjian hubungan udara dengan Indonesia, 22 negara telah merealisasikan perjanjian tersebut. Sampai dengan tahun 2008, Indonesia telah memiliki perjanjian hubungan udara bilateral dengan 71 negara. Negara-negara mitra Indonesia berdasarkan wilayah adalah:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) Amerika Utara | : 2 Negara |
| (2) Eropa | : 26 Negara |
| (3) Asia | : 14 Negara |
| (4) Asean | : 10 Negara |
| (5) Afrika | : 6 Negara |
| (6) Timur Tengah/Arab | : 10 Negara |
| (7) Pacific | : 3 Negara |

Jumlah perjanjian hubungan udara bilateral 71 negara, 36 operator penerbangan dari 22 negara melaksanakan penerbangan ke 11 kota tujuan di Indonesia (Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado), 9 perusahaan penerbangan nasional terbang ke 12 negara (Hongkong, Republik Rakyat China, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Philipina, Australia, Selandia Baru dan Arab Saudi) dengan 25 kota tujuan di mancanegara. Salah satu kerjasama yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah Pada tanggal 18-20 Oktober 2010 diadakan SKB IV Federasi Rusia di Jakarta. Poin-poin pembicaraan pada SKB tersebut antara lain: Transaero sebagai *designated airlines* dari Rusia telah menerbangi penerbangan berjadwal ke/dari Indonesia atas dasar ijin sementara. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perundingan pada bulan April 2010.

Pelaksanaan angkutan Haji pada fase pertama (keberangkatan) pada musim Haji 2011 /1432 H yang dilaksanakan melalui 11 embarkasi yaitu dengan pesawat Garuda Indonesia, melayani embarkasi : Banda Aceh, Padang, Palembang, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar dan Jakarta dan Saudi Airlines, melayani embarkasi : Batam, sebagian jemaah Haji dari embarkasi Jakarta dan Surabaya.

Jumlah jemaah haji yang diangkut (terealisasi) dari 11 embarkasi pada *Phase I* (pemberangkatan) sebanyak 202.356 jemaah dalam 499 kloter dari rencana 203.641 jemaah dalam 500 kloter dan selama periode pemulangan jemaah haji 1432 H tanggal 11 November 2011 s.d 11 Desember 2011, telah dipulangkan jemaah haji sebanyak 115.681 jemaah haji yang tergabung dalam 283 Kloter.

B. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2013 adalah:

1. Terjaminnya keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum serta kualitas pelayanan, kenyamanan, dalam penyelenggaraan transportasi udara;
2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi Udara yang stabil dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*sustainable growth*);
3. Terwujudnya persaingan usaha yang kompetitif didalam industri penerbangan nasional, yang menjamin kelangsungan usaha;
4. Terwujudnya aksesibilitas pelayanan angkutan udara yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keutuhan dan ketahanan nasional;
5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing;
6. Peningkatan keselamatan operasi dengan mengacu kepada aturan Internasional (ICAO) serta Pelaksanaan dan Implementasi dari Undang - Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan penetapan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan perhubungan udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan udara kepada masyarakat, baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor transportasi udara dalam jangka menengah (2010-2014) yang diimplementasikan pada pembangunan tiap tahunnya. Strategi Pembangunan Perhubungan Udara pada tahun 2013 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Strategi Pembangunan Perhubungan Udara dalam Renstra (2010-2014) yaitu:

- a. Pembangunan Perhubungan Udara dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
- b. Pembangunan Perhubungan Udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan udara memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;
- c. Pembangunan Perhubungan Udara difokuskan pada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang

- memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;
- d. Pembangunan Perhubungan Udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);
 - e. Pembangunan Perhubungan Udara dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui dua pendekatan sekaligus yaitu mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*);
 - f. Pembangunan Perhubungan Udara dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan nasional;
 - g. Pembangunan Perhubungan Udara dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan, baik skala kecil, menengah maupun skala besar.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan Transportasi Udara pada tahun 2013 bertujuan melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal, peningkatan dukungan terhadap daya saing sektor riil serta peningkatan investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan prioritas menunjang pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja yang dijabarkan dalam 4 program yaitu:

1. Program Pembangunan Transportasi Udara, bertujuan untuk mewujudkan pengembangan/pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional melalui, menjamin implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional dan menciptakan daya saing industri angkutan udara nasional dengan penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara secara selektif dalam menghadapi pasar global;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara, bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional melalui pemenuhan prosedur kerja, standar pelayanan, dan *On Time Performance* serta Implementasi ketentuan keselamatan penerbangan secara optimal;
3. Program Restrukturisasi dan Kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara, menjamin prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi

birokrasi serta mewujudkan penyempurnaan peraturan dibidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional;

4. Program Penyelenggaraan Pimpinan Pemerintahan dan Kenegaraan, bertujuan untuk menjamin peningkatan kemampuan personal dibidang teknis dan operasi harus memiliki sertifikat kecakapan personal (SKP) serta tenaga manajer dan administrasi secara bertahap harus mengikuti jenjang pendidikan keprofesionalan dibidang transportasi udara.

Uraian kegiatan ke 4 program tersebut dengan biaya dari APBN sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2013 hasil *trilateral meeting* yang disampaikan melalui Surat Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Nomor: 0096/M.PPN/03/2012 S-214/MK/02/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

TABEL VI. 1
PROGRAM PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA TRANSPORTASI UDARA

NO.	PROGRAM	LOKASI	VOL	SAT	ALOKASI (RP. 000)
1	Fasilitas Landasan - Landasan Pacu - Taxiway - Apron	102 Bandara	2.179.571	m2	1.536.693,8
2	Bangunan dan Terminal - Gedung Kantor - Rumah Ops, Bangunan operasional - Terminal - Jalan, Parkir, Pagar - Ged. Khusus	Terminal : 34 Bandara Bangunan : 120 Bandara Parkir : 30 Bandara Pagar : 70 Bandara Jalan : 70 Bandara Ged. Khusus : Gedung JAATS	16.537 41.870 55.447 119.801 126.168 1	m2 m2 m2 m2 m2 Pkt	1.156.218,06
3	Fasilitas Keselamatan Penerbangan: - suku cadang dan penunjang Fas. Navigasi Penerbangan - suku cadang dan penunjang Fas. Keamanan Penerbangan	22 Lokasi 20 Lokasi	248 PKT 203 PKT		239.277,289 26.126,290
JUMLAH					2.958.315,44

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

TABEL VI.2
PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

NO.	PROGRAM	LOKASI	VO L	SAT	ALOKASI (RP. 000)
1	Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis	20 lokasi	132	Rute	281.496.438
2	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan	42 Lokasi	448	Pkt	265.403.579
3	<i>Pembangunan Gedung Jakarta Automated Air Traffic System (JAATS)</i>	1 Lokasi	1	Pkt	183.677.265
4	Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana	46 Lokasi	46	Bandara	883.810,702
5.	Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri	1 Lokasi	1	Kegiatan	53.054.031
JUMLAH					1.667.442,02

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Adapun untuk anggaran total Dirjen Perhubungan Udara (Pagu Indikatif 2013) berdasarkan hasil *trilateral meeting* yang diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon II dapat dilihat pada tabel VI-3 dimana kegiatan 2013 antara lain yaitu Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud, Pelayanan Angkutan Udara Perintis (BBTM), Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan, Pengawasan & Pembinaan Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Udara.

TABEL VI.3
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI UDARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	VOL	SAT	ALOKASI (RP. 000)
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud	163	Bandara	732.784.500
2	Pelayanan Angkutan Udara Perintis (BBTM)	132/20	Rute/Lokasi	281.496,438
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	163	Satker	3.697.956.732
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	163	Satker	373.353.184
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	163	Satker	829.786.033
6	Pengawasan & Pembinaan Kelaikan Udara & Pengops Pesawat Udara	3	Satker	152.880.046
JUMLAH				6,068,256,933

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Kegiatan Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud secara lebih detail dapat dilihat pada tabel VI-4.

TABEL VI.4
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN & DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
DITJEN HUBUD

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	5 Pkt	Pkt	7.442.298
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya			
2	Lasikin-Sinabang			
3	Cut Ali-Tapaktuan			
4	Maimun Saleh-Sabang			
5	Rembele-Takengon			
II	SUMATERA UTARA			
1	Kantor Otoritas Wilayah II - Medan			
2	Silangit-Siborong Borong			
3	DR. FL. Tobing-Tapanuli Tengah			
4	Aek Godang-Pdg Sidempuan	6	Pkt	20.386.860
5	Binaka - Gunung Sitoli			
6	Lasondre-PP. Batu			
III	SUMATERA BARAT	2	Pkt	5.440.350
1	Sipora-Rokot			
2	Kantor Otoritas wil VI - Padang			
IV	BENGKULU			
1	Fatmawati Soekarno	2	Pkt	14.865.562
2	Muko-Muko - Muko Muko			
V	KEPULAUAN RIAU			
1	Dabo-Singkep			
2	Seibati-Tanjung Balai Karimun	3	Pkt	12.102.904
3	Hang Nadim-Batu Besar Pulau			
VI	R I A U			
1	Japura - Rengat	1	Pkt	2.192.876
VII	L A M P U N G			
1	Radin Inten II-Lampung	2	Pkt	16.384.550
2	Pekoserai-Lampung Barat			
VIII	J A M B I			
1	Depati Parbo-Kerinci	1	Pkt	1.321.774
IX	BANGKA BELITUNG	1	Pkt	8.778.918
1	H. AS. Hanandjoedin-Tjg Pandan			
X	JAWA BARAT			
1	Cakrabuwana-Cirebon	1	Pkt	3.010.235

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
XI 1	B A N T E N Budiarto-Curug	1	Pkt	7.484.295
XII 1 2	JAWA TENGAH Dewadaru-KarimunJawa Tunggul Wulung-Cilacap	2	Pkt	5.575.461
XIII 1 2 3	JAWA TIMUR Kantor Otorita Wilayah III - Surabaya Banyuwangi Trunojoyo-Sumenep	3	Pkt	12.387.841
XIV 1	B A L I Kantor Otorita Wilayah IV - Denpasar	1	Pkt	8.058.520
XV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	KALIMANTAN TIMUR Temindung-Samarinda Melak Long Ampung Datah Dawai Juwata-Tarakan Kalimarau Tanjung Harapan Yuvei Semaring-Long Bawan Nunukan Malinau Kantor Otoritas Wilayah VII Balikpapan	11	Pkt	46.172.026
XVI 1 2 3 4 5 6 7 8	KALIMANTAN TENGAH Tjilik Riwut-Palangkaraya Tumbang Samba H. Asan - Sampit Iskandar-Pangkalan Bun Kuala Kurun Beringin - Muara Teweh Sanggu-Buntok Kuala Pembuang	8	Pkt	29.423.491
XVII 1 2 3 4	KALIMANTAN BARAT Susilo-Sintang Nangapinoh Pangsuma-Putussibau Rahadi Oesman-Ketapang	4	Pkt	9.203.763
XVIII 1	KALIMANTAN SELATAN Gusti Sjamsir Alam-Kotabaru	1	Pkt	2.999.958
XIX 1	SULAWESI UTARA Naha-Tahuna			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
2	Melongguane	3	Pkt	5.704.200
3	Kantor Otoritas wilayah VIII - Manado			
XX	GORONTALO			
1	Djalaluddin-Gorontalo	1	Pkt	7.334.587
XXI	SULAWESI TENGAH			
1	Mutiara-Palu	5	Pkt	20.851.213
2	Syukuran Aminuddin Amir-Luwuk			
3	Lalos-Toli Toli			
4	Pogogul - Buol			
5	Kasiguncu-Poso			
XXII	SULAWESI TENGGARA	3	Pkt	14.549.685
1	Halu Oleo-Kendari			
2	Betoambari-Bau Bau			
3	Sugimanuru-Muna			
XXIII	SULAWESI SELATAN	4	Pkt	12.840.890
1	Kantor Otorita Wilayah V - Makassar			
2	Pongtiku-Tana Toraja			
3	Andi Jemma-Masamba			
4	Aroeppala-Selayar			
XXIV	SULAWESI BARAT	1	Pkt	2.448.828
1	Tampa Padang-Mamuju			
XXV	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Mali-Alor	13	Pkt	28.740.692
2	Gewayantana-Larantuka			
3	Soa - Bajawa			
4	Wunopito-Lewoleba			
5	Lekunik-Rote			
6	Haliwen-Atambua			
7	Tardamu-Sabu			
8	Satartacik-Ruteng			
9	H.H. Aroeboesman-Ende			
10	Komodo-Labuhan Bajo			
11	Waioti - Maumere			
12	Umbu Mehang Kunda-Waingapu			
13	Tambolaka-Waikabubak			
XXVI	NUSA TENGGARA BARAT			
1	Brangbiji-Sumbawa Besar	2	Pkt	8.607.906
2	M. Salahuddin-Bima			
XXVII	M A L U K U			
1	Bandaneira	4	Pkt	6.960.002
2	Dumatubun-Langgur			
3	Saumlaki-Baru			
4	D o b o			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
XXVIII	MALUKU UTARA			
1	Babullah-Ternate			
2	Buli-Maba	4	Pkt	15.255.314
3	Usman Sadik-Labuha			
4	Gamarmalamo-Galela			
XXIX	P A P U A			
1	Sentani-Jayapura			
2	Mopah-Merauke			
3	Kamur	36	Pkt	99.368.346
4	Bomakia			
5	N a b i r e			
6	Moanamani			
7	Enarotali			
8	Wamena			
9	Mararena-Sarmi			
10	S. Tjondronegoro-Serui			
11	Kokonao-Timika			
12	O b a n o			
13	I l l u			
14	I l a g a			
15	Tanah Merah-Merauke			
16	Mindiptanah-Merauke			
17	O k s i b i l			
18	Waghete			
19	M u l i a			
20	Bokondini			
21	K e p i			
22	O k a b a			
23	N u m f o r			
24	Karubaga			
25	E w e r			
26	B a t o m			
27	B a d e			
28	Senggeh			
29	T i o m			
30	T i m i k a			
31	Dabra			
32	Lereh			
33	Waris			
34	Kimam			
35	Senggo			
36	Kantor Otoritas Wilayah - 10 Merauke			
XXX	PAPUA BARAT			
1	Rendani-Manokwari			
2	M e r d e y			
3	K e b a r	14	Pkt	36.821.566
4	W a s i o r			
5	B i n t u n i			
6	Torea-Fak Fak			
7	Kaimana			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
8	Domine Eduar Osok-Sorong			
9	Teminabuan			
10	Inanwatan			
11	Kambuaya			
12	Ayawasi			
13	B a b o			
14	Kantor Otorita Wilayah IX - Manokwari			
XXXI	DKI JAKARTA			
1	Kantor Pusat Setditjen Hubud			
2	Direktorat Bandar Udara			
3	Direktorat Angkutan Udara			
4	Direktorat Keamanan Penerbangan			
5	Direktorat Navigasi Penerbangan			
6	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	10	Pkt	260.069.589
7	Balai Kesehatan Penerbangan			
8	Balai Kalibrasi Faspem			
9	Balai Elektronika			
10	Kantor Otoritas Wilayah I			
JUMLAH				732,784,500

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Anggaran untuk kegiatan pelayanan angkutan udara perintis yang dapat membuka keterisolasian wilayah dapat dilihat pada tabel VI-5.

TABEL VI.5
KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya	2	Pkt	35.416.525
2	Rembele-Takengon			
II	SUMATERA UTARA			
	Binaka - Gunung Sitoli	1	Pkt	13.881.265
III	KALIMANTAN TIMUR			
	Temindung-Samarinda	1	Pkt	22.452.788
IV	KALIMANTAN TENGAH			
	Beringin - Muara Teweh	1	Pkt	10.989.615
V	KALIMANTAN BARAT			
	Rahadi Oesman-Ketapang	1	Pkt	10.251.107
VI	SULAWESI TENGAH			
		2	Pkt	15.321.790

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
1	Lalos-Toli Toli			
2	Kasiguncu-Poso			
VII	SULAWESI SELATAN	4	Pkt	31.769.668
1	Andi Jemma-Masamba			
2	Seko			
3	Rampi			
4	Aroeppala-Selayar			
VIII	SULAWESI BARAT			
	Tampa Padang-Mamuju	1	Pkt	9.340.868
IX	NUSA TENGGARA TIMUR	1	Pkt	8.431.168
	Tardamu-Sabu			
X	M A L U K U	1	Pkt	19.515.649
	Dumatubun-Langgur			
XI	MALUKU UTARA	1	Pkt	18.463.893
	Babullah-Ternate			
XII	P A P U A			
1	Sentani-Jayapura	3	Pkt	76.808.679
2	Mopah-Merauke			
3	N a b i r e			
XIII	PAPUA BARAT	1	Pkt	15.895.861
	RENDANI-MANOKWARI			
XIV	DKI JAKARTA			
	Dit. Angkutan Udara	1	Pkt	2.302.500
JUMLAH				290,841,376

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Adapun Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Tahun Anggaran 2013 (Pagu Indikatif 2013) dapat dilihat pada Tabel VI-6.

TABEL VI.6
KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
		8	Pkt	39.318.292
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya			
2	Lasikin-Sinabang			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
3	Cut Ali-Tapak Tuan			
4	Maimun Saleh-Sabang			
5	Rembele-Takengon			
6	Cut Nyak Dhien-Naga Raya			
7	Lasikin-Sinabang			
8	Cut Ali-Tapak Tuan			
II	SUMATERA UTARA	7	Pkt	184.161.773
1	Bandar Udara Medan Baru			
2	FL. Tobing			
3	Binaka - Sitoli			
4	Lasondre - P. Batu			
5	Kantor Otoritas Wilayah II - Medan			
6	Silangit - Siborong-borong			
7	Aek Godang			
III	SUMATERA SELATAN			
	Silampari	1	Pkt	17.733.470
IV	SUMATERA BARAT			
1	Rokot Sipora			
2	Kantor Otoritas Wilayah VI - Padang	2	Pkt	28.524.700
V	BENGGULU	4	Pkt	158.698.245
1	Fatmawati			
2	Muko-Muko			
3	Muara Bungo			
4	S.Thaha			
VI	KEPULAUAN RIAU	3	Pkt	35.073.763
1	Dobo - Singkep			
2	Hang Nadim - Batam			
3	Tanjung Balai Karimun			
VII	R I A U			
	Japura - Rengat	1	Pkt	14.460.973
VIII	L A M P U N G			
	Radin Inten II	1	Pkt	54.912.044
IX	J A M B I			
	Depati parbo - Kerinci	1	Pkt	14.296.600
X	BANGKA BELITUNG			
	Hanandjoedin - Tg. Pandan	1	Pkt	74.532.606
XI	JAWA BARAT			
	Cakrabuana - Cirebon	1	Pkt	6.419.500
XII	B A N T E N			
	Budiarto - Curug	1	Pkt	33.750.451

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
XIII	JAWA TENGAH	3	Pkt	149.198.122
1	Ahmad Yani - Semarang			
2	Tunggul wulung Cilacap			
3	Dewadaru - Karimun jawa			
XIV	JAWA TIMUR	4	Pkt	75.873.345
1	Abdul Rahman Saleh			
2	Banyuwangi			
3	Kantor Otoritas Surabaya			
4	Trunojoyo Sumenep			
XV	B A L I			
	Kantor Otoritas Denpasar	1	Pkt	12.682.512
XVII	KALIMANTAN TIMUR	11	Pkt	266.725.634
1	Juwata Tarakan			
2	Temindung Samarinda			
3	Kalimarau			
4	Malinau			
5	Melak			
6	Tanjung Harapan			
7	Yuvai Semaring			
8	Nunukan			
9	Long Ampung			
10	Datah Dawai			
11	Kantor Otoritas Wilayah Balikpapan			
XVIII	KALIMANTAN TENGAH	8	Pkt	174.371.842
1	Tjilik riwut palangkaraya			
2	Iskandar - pangkalan bun			
3	Hasan Sampit			
4	Beringin Muara Teweh			
5	Tumbang Samba			
6	Sunggu BUntok			
7	Kuala Pembuang			
8	Kuala Kurun			
XIX	KALIMANTAN BARAT	4	Pkt	100.204.223
1	Rahadi Oesman - Ketapang			
2	Susilo Sintang			
3	Pangsuma - Putusibau			
4	Nangapinoh			
XX	KALIMANTAN SELATAN			
	Gusti Syamsir Alam	1	Pkt	24.735.000
XXI	SULAWESI UTARA	3	Pkt	54.419.948
1	Naha Tahuna			
2	Kantor Otoritas Manado			
3	Melongguane			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
XXII	GORONTALO Djalaluddin	1	Pkt	70.684.250
XXIII	SULAWESI TENGAH	5	Pkt	145.533.465
1	Mutiara Palu			
2	Konsingucu Poso			
3	Syukuran Aminuddin Luwuk			
4	Bantilan Toli-Toli			
5	Buol			
XXIV	SULAWESI TENGGARA	3	Pkt	89.150.688
1	Halu oleo Kendari			
2	Betoambari Buton			
3	Sugimanuru Muna			
XXV	SULAWESI SELATAN	6	Pkt	80.160.729
1	Kantor Otorita Makassar			
2	Tana Toraja			
3	Seko			
4	Rampi			
5	Aeropala Selayar			
6	Andijema Masamba			
XXVI	SULAWESI BARAT Tampa Padang Mamuju	1	Pkt	17.058.780
XXVII	NUSA TENGGARA TIMUR	13	Pkt	161.234.444
1	Umbu Mehang Kunda - Waingapu			
2	Tambolaka			
3	Fran Seda maumere			
4	Frans Sales Lega Ruteng			
5	Aeroboelman Ende			
6	Mali Alor			
7	Gewayantana - larantuka			
8	Komodo - Labuan bajo			
9	Soa - Bajawa			
10	Haliwen Atambua			
11	Saudate - Rote			
12	Tardamu Sabu			
13	Wunopito - Lewoleba			
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT	2	Pkt	18.795.109
1	Brangbiji			
2	Salahudin Bima			
XXIX	M A L U K U	5	Pkt	112.716.135
1	Bandaneira			
2	Dobo			
3	Saumlaki			
4	Namniwel			
5	Dumatubun Langgur			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP.000)
XXX	MALUKU UTARA	5	Pkt	80.496.078
1	Babullah Ternate			
2	Usman Sadik			
3	Gamarmalamo - Galela			
4	Buli maba			
5	Kuabang Kao			
XXXI	P A P U A	1	Pkt	612.347.644
	Sentani, Merauke, dst			
XXXIII	DKI JAKARTA	1	Pkt	436.524.119
	Direktorat Bandar Udara			
JUMLAH				3,344,794,484

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan dalam Pagu Indikatif 2013 dapat dilihat pada tabel VI-7.

TABEL VI.7
KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA KEAMANAN PENERBANGAN

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP. 000)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	8	Pkt	7.802.000
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya			
2	Lasikin-Sinabang			
3	Cut Ali-Tapaktuan			
4	Maimun Saleh-Sabang			
5	Rembele-Takengon			
6	Cut Nyak Dhien-Naga Raya			
7	Lasikin-Sinabang			
8	Cut Ali-Tapaktuan			
II	SUMATERA UTARA	7	Pkt	6.701.417
1	Bandar Udara Medan Baru			
2	FL. Tobing			
3	Binaka - Sitoli			
4	Lasondre - P. Batu			
5	Kantor Otoritas Wilayah II - Medan			
6	Silangit - Siborong-borong			
7	Aek Godang			
III	SUMATERA SELATAN	1	Pkt	6.500.000
	Silampari			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP. 000)
IV	SUMATERA BARAT			
1	Rokot Sipora			
2	Kantor Otoritas Wilayah VI - Padang	2	Pkt	2.331.000
V	BENGKULU			
1	Fatmawati			
2	Muko-Muko			
3	Muara Bungo	4	Pkt	16.848.500
4	S.Thaha			
VI	KEPULAUAN RIAU			
1	Dobo - Singkep			
2	Hang Nadim - Batam	3	Pkt	35.073.763
3	Tanjung Balai Karimun			
VII	R I A U			
	Japura - Rengat	1	Pkt	14.460.973
VIII	L A M P U N G			
	Radin Inten II	1	Pkt	5.330.000
IX	J A M B I			
	Depati Parbo	1	Pkt	972.500
X	BANGKA BELITUNG			
	Hanandjoedin Tg.Pandan	1	Pkt	400.000
XI	JAWA BARAT			
	Cakrabuana Cirebon	1	Pkt	625.000
XIII	JAWA TENGAH			
1	Ahmad Yani - Semarang			
2	Tunggul wulung Cilacap	3	Pkt	3.100.000
3	Dewadaru - Karimun jawa			
XIV	JAWA TIMUR			
1	Abdul Rahman Saleh			
2	Banyuwangi			
3	Kantor Otoritas Surabaya	4	Pkt	800.000
4	Trunojoyo Sumenep			
XVII	KALIMANTAN TIMUR			
1	Juwata Tarakan			
2	Temindung Samarinda			
3	Kalimarau			
4	Malinau			
5	Melak	11	Pkt	19.615.500
6	Tanjung Harapan			
7	Yuvai Semaring			
8	Nunukan			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP. 000)
9	Long Ampung			
10	Datah Dawai			
11	Kantor Otoritas Wilayah Balikpapan			
XVIII	KALIMANTAN TENGAH			
1	Tjilik riwut palangkaraya			
2	Iskandar - pangkalan bun			
3	Hasan Sampit			
4	Beringin Muara Teweh			
5	Tumbang Samba	8	Pkt	4.340.500
6	Sunggu BUntok			
7	Kuala Pembuang			
8	Kuala Kurun			
XIX	KALIMANTAN BARAT			
1	Rahadi Oesman - Ketapang			
2	Susilo Sintang			
3	Pangsuma - Putusibau	4	Pkt	2.951.600
4	Nangapinoh			
XXI	SULAWESI UTARA			
1	Naha Tahuna			
2	Kantor Otoritas Manado	3	Pkt	7.515.000
3	Melongguane			
XXIII	SULAWESI TENGAH			
1	Mutiara Palu			14.250.000
2	Konsingucu Poso			
3	Syukur Aminuddin Luwuk	5	Pkt	
4	Bantilan Toli-Toli			
5	Buol			
XXIV	SULAWESI TENGGARA			
1	Halu oleo Kendari			
2	Betoambari Buton	3	Pkt	7.952.000
3	Sugimanuru Muna			
XXV	SULAWESI SELATAN			
1	Kantor Otorita Makassar			
2	Tana Toraja			
3	Seko			
4	Rampi	6	Pkt	19.277.200
5	Aeropala Selayar			
6	Andijema Masamba			
XXVI	SULAWESI BARAT			
	Tampa Padang Mamuju	1	Pkt	425.000
XXVII	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Umbu Mehang Kunda - Waingapu	13	Pkt	5.932.500

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP. 000)
2	Tambolaka			
3	Fran Seda maumere			
4	Frans Sales Lega Ruteng			
5	Aeroboelman Ende			
6	Mali Alor			
7	Gewayantana - larantuka			
8	Komodo - Labuan bajo			
9	Soa - Bajawa			
10	Haliwen Atambua			
11	Saudate - Rote			
12	Tardamu Sabu			
13	Wunopito - Lewoleba			
XXIX	M A L U K U			
1	Bandaneira			
2	Dobo			
3	Saumlaki	5	Pkt	11.850.000
4	Namniwel			
5	Dumatubun Langgur			
XXX	MALUKU UTARA			
1	Babullah Ternate			
2	Usman Sadik			
3	Gamarmalamo - Galela	5	Pkt	4.070.000
4	Buli maba			
5	Kuabang Kao			
XXXI	P A P U A			
	Sentani, Merauke, dst	1	Pkt	24.777.200
XXXII	PAPUA BARAT			
	Rendani, DEO Sorong, dst	1	Pkt	17.620.000
XXXIII	DKI JAKARTA			
	Direktorat Keamanan Penerbangan	1	Pkt	155.605.284
JUMLAH				397,126,937

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Adapun alokasi anggaran Tahun 2013 untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan per Provinsi dapat dilihat pada tabel VI-8.

TABEL VI.8
KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA NAVPEN

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP 000)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya	5	Pkt	80.000
2	Lasikin-Sinabang			
3	Cut Ali-Tapaktuan			
4	Maimun Saleh-Sabang			
5	Rembele-Takengon			
II	SUMATERA UTARA			
1	Bandar Udara Medan Baru			
2	FL. Tobing			
3	Binaka - Sitoli			
4	Lasondre - P. Batu	7	Pkt	31.786.958
5	Kantor Otoritas Wilayah II - Medan			
6	Silangit - Siborong-borong			
7	Aek Godang			
III	BENGGKULU			
1	Fatmawati			
2	Muko-Muko			
3	Muara Bungo	4	Pkt	2.240.000
4	S.Thaha			
IV	KEPULAUAN RIAU			
1	Dobo - Singkep			
2	Hang Nadim - Batam	3	Pkt	7.350.000
3	Tanjung Balai Karimun			
V	R I A U			
	Japura - Rengat	1	Pkt	800.000
VI	L A M P U N G			
	Radin Inten II	1	Pkt	18.200.000
VII	BANGKA BELITUNG			
	Hanandjoedin	1	Pkt	8.450.000
VIII	JAWA BARAT			
	Cakrabuana Cirebon	1	Pkt	3.550.000
IX	B A N T E N			
	Budiarto Curug	1	Pkt	1.400.000
X	JAWA TENGAH			
1	Ahmad Yani - Semarang			
2	Tunggul wulung Cilacap	3	Pkt	200.000
3	Dewadaru - Karimun jawa			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP 000)
XI	JAWA TIMUR			
1	Abdul Rahman Saleh			
2	Banyuwangi			
3	Kantor Otoritas Surabaya	4	Pkt	4.600.000
4	Trunojoyo Sumenep			
XII	KALIMANTAN TIMUR			
1	Juwata Tarakan			
2	Temindung Samarinda			
3	Kalimarau			
4	Malinau			
5	Melak			
6	Tanjung Harapan	11	Pkt	67.838.456
7	Yuvai Semaring			
8	Nunukan			
9	Long Ampung			
10	Datah Dawai			
11	Kantor Otoritas Wilayah Balikpapan			
XIII	KALIMANTAN TENGAH			
1	Tjilik riwut palangkaraya			
2	Iskandar - pangkalan bun			
3	Hasan Sampit			
4	Beringin Muara Teweh			
5	Tumbang Samba	8	Pkt	9.780.000
6	Sunggu BUntok			
7	Kuala Pembuang			
8	Kuala Kurun			
XIV	KALIMANTAN SELATAN			
	Gusti Syamsir Alam - Kota baru	1	Pkt	280.000
XV	SULAWESI TENGAH			
1	Mutiara Palu			
2	Konsingucu Poso			
3	Syukuran Aminuddin Luwuk			
4	Bantilan Toli-Toli	5	Pkt	8.950.000
5	Buol			
XVI	SULAWESI SELATAN			
1	Kantor Otorita Makassar			
2	Tana Toraja			
3	Seko			
4	Rampi	6	Pkt	3.985.000
5	Aeropala Selayar			
6	Andijema Masamba			
XVII	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Umbu Mehang Kunda - Waingapu			
2	Tambolaka	13	Pkt	10.838.000
3	Fran Seda maumere			

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	VOL	SAT	ALOKASI (RP 000)
4	Frans Sales Lega Ruteng			
5	Aeroboeman Ende			
6	Mali Alor			
7	Gewayantana - Iarantuka			
8	Komodo - Labuan Bajo			
9	Soa - Bajawa			
10	Haliwen Atambua			
11	Saudate - Rote			
12	Tardamu Sabu			
13	Wunopito - Lewoleba			
XVIII	M A L U K U			
1	Bandaneira			
2	Dobo			
3	Saumlaki	5	Pkt	80.000
4	Namniwel			
5	Dumatubun Langgur			
XIX	MALUKU UTARA			
1	Babullah Ternate			
2	Usman Sadik			
3	Gamarmalamo - Galela	5	Pkt	10.645.000
4	Buli maba			
5	Kuabang Kao			
XX	P A P U A			
	Sentani, Mopah, dst	1	Pkt	49.970.000
XXI	PAPUA BARAT			
	Rendani, Manokwari, DEo Sorong, dst	1	Pkt	11.140.000
XXII	DKI JAKARTA			
1	Direktorat Navigasi Penerbangan			
2	Balai Elektronika Penerbangan	2	Pkt	574.760.033
	JUMLAH			1,440,000

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012

Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada Tabel VI-9.

TABEL VI.9
KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA KUPPU

NO.	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI (RP. 000)
I	DKI JAKARTA	
1.	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	152.880.046
2.	Balai Kalibrasi Penerbangan	
3.	Balai Kesehatan Penerbangan	
	JUMLAH	152.880.046

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2012